

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

*Financial statements* kini masih digunakan sebagai sumber informasi yang kredibilitasnya dipercaya oleh *stakeholders* untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan selama periode berjalan dalam rangka dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan (Kieso et al, 2015). Salah satu tujuan utama perusahaan mempublikasikan laporan keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang berhubungan secara langsung dengan perusahaan, salah satunya adalah pemegang saham dalam rangka melakukan pengambilan keputusan ekonomi.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan salah satu pilar dari standar pelaporan keuangan bagi entitas privat pada implementasinya bersifat *principle based*. Hal tersebut menunjukkan bahwa regulator memberikan fleksibilitas serta kewenangan bagi perusahaan untuk dapat menerapkan pilihan metode maupun kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukannya selama masih sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, kebebasan tersebut nyatanya cenderung mendorong intensi dari manajer untuk mengambil peluang dari celah yang terjadi untuk memaksimalkan keuntungan dirinya semata, yakni melalui tindakan manipulasi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan (Alves, 2014).

Adanya tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari tindakan kecurangan dalam proses penyajian laporan finansial. Menurut *Association Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan dalam laporan keuangan merupakan klasifikasi terhadap aksi *fraud* yang dapat terjadi dalam sebuah entitas bisnis. Praktik manipulasi laba yang dilakukan secara berlebihan dan kontinu dikhawatirkan dapat membawa dampak berupa kerugian dalam nilai yang material bagi pemangku kepentingan perusahaan.

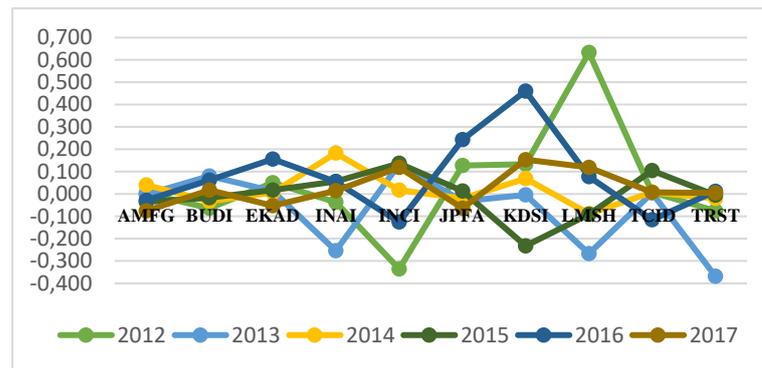
*Fraudulent financial statements* merujuk kepada perilaku pihak manajemen perusahaan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan mengenai kesehatan keuangan yang sebenarnya melalui manipulasi terhadap informasi finansial dalam tahapan penyusunan laporan keuangan perusahaan agar memperoleh keuntungan sepihak saja (ACFE, 2020).



**Gambar 1. Hasil Survei ACFE dalam RPTN Tahun 2020**

Sumber : *Association of Certified Fraud Examiners (2020)*

Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh *Association Certified Fraud Examiners* dalam *Report to The Nations* pada tahun 2020 yang mengangkat pembahasan terkait kajian global mengenai kejahatan berupa penipuan dan penyalahgunaan pekerjaan telah ditemukan beberapa fakta mengenai kejahatan *fraud* yang berpotensi paling merugikan dalam setiap entitas bisnis maupun negara. Seperti yang dijelaskan pada Gambar 1, dapat dipahami bahwa meskipun persentase kasus fraud yang sering terjadi adalah penyalahgunaan aset (*assets misappropriation*), namun kejahatan yang sebenarnya membawa dampak kerugian paling besar adalah kecurangan laporan keuangan dengan nilai kerugian median mencapai US\$ 954,000 (ACFE, 2020). Manipulasi yang terjadi nyatanya memang selaras dengan tujuan manajer dalam melakukan manajemen laba yakni untuk mengintervensi laporan keuangan secara implisit dengan mengubah laba baik *overstated* maupun *understated* agar sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai perusahaan (Adi & Lesmana, 2017)

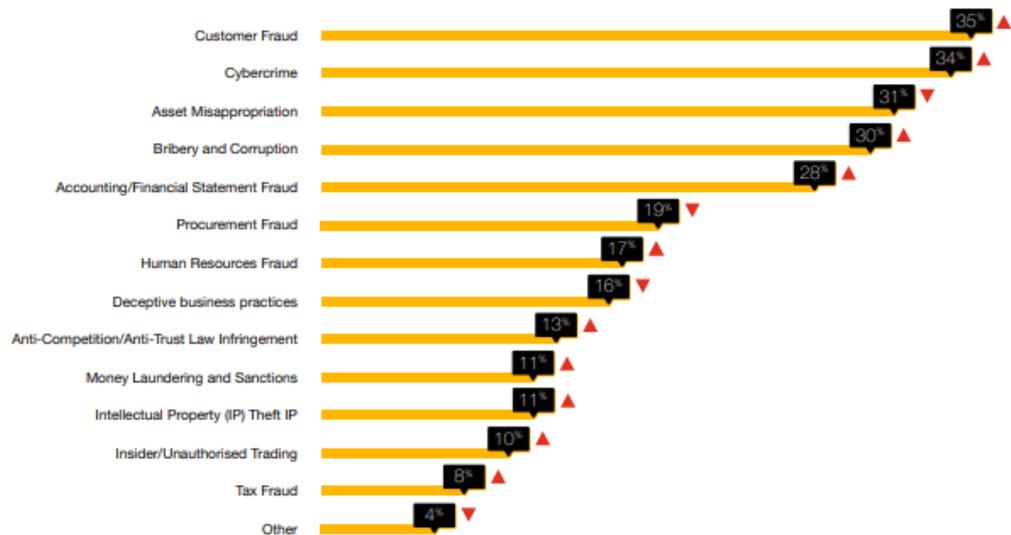


**Gambar 2. Nilai Deteksi Manajemen Laba**

Sumber : Sari et.al, (2019)

Gambar 2 menunjukkan informasi mengenai perusahaan manufaktur yang dicurigai telah melakukan aktivitas manajemen laba. Sepanjang periode pengamatan tahun 2012-2017, terjadi fluktuasi keadaan manajemen laba pada entitas yang diamati menjadi sampel pengamatan. Perusahaan terindikasi melakukan manipulasi laba dengan menggunakan indikator penilaian *Schaled Earnings Changes*, dimana entitas yang berpotensi mengadakan tindakan tersebut menunjukkan perhitungan nilai residual di atas 0 (Sari et al., 2019). Berdasarkan narasi informatif statistik deskriptif ini, perusahaan LMSH memperoleh nilai residual tertinggi pada tahun 2012 sebesar 0,633, sedangkan nilai residual terendah dalam pengamatan ini diperoleh perusahaan TRST pada tahun 2013, yakni sebesar -0,368 pada tahun 2013.

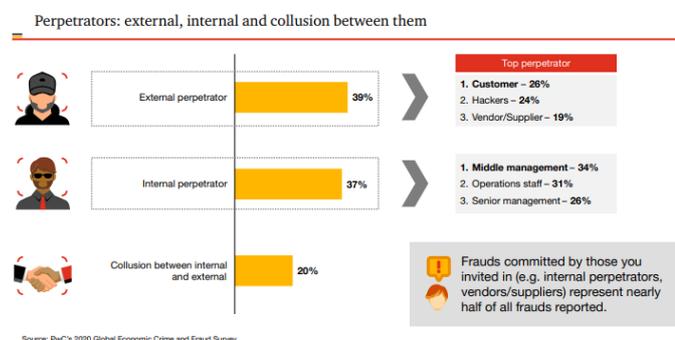
Manajemen laba sebagai bagian dari tindakan kecurangan dalam laporan keuangan juga didukung oleh adanya hasil survei yang telah dirilis oleh dalam *Global Economic Crime and Fraud Survey* yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers pada tahun 2020. Survei tersebut dilakukan terhadap 5000 responden yang melaporkan terjadinya tindakan *fraud* selama 2 tahun terakhir yang tersebar pada 99 negara. Survei tersebut membuktikan bahwa tindakan *fraud* telah menyebabkan kerugian yang cukup signifikan senilai US\$ 42 Miliar. Sebagai tambahan, tindakan manajemen laba yang merupakan bagian dari modus kecurangan akuntansi dan laporan keuangan juga menempati urutan kelima dari seluruh modus kejahatan *fraud* lainnya, dimana kasus tersebut cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 28% (PwC, 2020)



**Gambar 3 Hasil Global Economic Crisis Survey Mengenai Tren Kecurangan**

Sumber: PwC (2020)

Hasil survei tersebut juga mengungkapkan temuan bahwa dalam kasus *fraud* yang terjadi pada sebuah entitas bisnis juga terdapat keterlibatan aktif dari pihak internal perusahaan sebesar 37%. Hal ini memang selaras dengan tren manajemen laba yang secara umum dilancarkan oleh pihak jajaran manajerial selaku agen yang mengantongi dukungan informasi yang lebih kompleks mengenai aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan (Al-Rassas & Kamardin, 2015; Surbakti & Samosir, 2019). Berdasarkan survei tersebut, diketahui bahwa *middle management* memiliki keterlibatan paling tinggi dalam terjadinya kecurangan sebesar 34%, yang mana manajer keuangan merupakan salah satu bagian dari manajemen level menengah dalam perusahaan (PwC, 2020)



**Gambar 4 Keterlibatan Pihak Manajemen dalam Kasus *Financial Statement Fraud***

Sumber: PwC (2020)

Fenomena mengenai aktivitas manajemen laba juga selaras dengan hasil kajian terdahulu. Seperti yang dikemukakan Astuti et al., (2021) melalui penelitian dengan populasi perusahaan kecuali perusahaan sektor finansial yang ada dalam Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2017-2019, hasil studi ini merefleksikan bahwa entitas masih melakukan tindakan pemodifikasian laba dengan memanfaatkan arus biaya produksi, kas operasional, dan beban diskresioner dengan rata-rata tertinggi sebesar 1,035 atau 103,5% perusahaan non-keuangan memanfaatkan biaya produksi dalam melakukan manajemen laba.

Dalam rangka menunjang keberhasilan aktivitas operasional, setiap entitas bisnis selalu menganggarkan capaian laba usaha selama periode berjalan yang harus direalisasikan sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan eksistensi serta keberlangsungan usaha (Susanto & Pradipta, 2016). Pada hakikatnya, laporan keuangan merupakan representasi perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dengan pihak eksternal. Terjadinya tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen timbul sebagai dampak atas desakan dari pemilik bisnis untuk dapat memenuhi atau bahkan mampu melebihi target laba tersebut (Bereskin et al, 2018). Secara umum, perusahaan di Indonesia mayoritas masih mengukur kinerja manajer berdasarkan target laba yang dibebankan dan berhasil diperoleh.

Hal tersebut merupakan sebuah stimulus bagi manajer menjadi termotivasi untuk dapat mencapai target tersebut agar dapat menunjukkan reputasi yang baik atas kinerja manajemen, meningkatkan kepercayaan pemegang saham di pasar modal, serta sebagai upaya untuk dapat mempertahankan harga saham perusahaan (Graham et al., 2005). Namun, pada kenyataannya manajer perusahaan tidak selalu berhasil mencapai target laba tersebut. Hal tersebut mendorong timbulnya konflik kepentingan (*conflicts of interest*) dimana manajer akan selalu berupaya untuk mencapai kepuasan dirinya sendiri sehingga mereka akan melakukan upaya manipulasi terhadap proses penyusunan laporan keuangan agar memperoleh nilai laba sesuai dengan yang telah direncanakan (Susanto & Pradipta, 2016).

Praktik manajemen laba perusahaan ini masih menjadi salah satu pusat perhatian yang disoroti baik oleh regulator maupun media massa. Kasus ini dapat dijumpai pada negara maju sekalipun, contohnya seperti di Amerika Serikat. Hal tersebut dipicu oleh maraknya desakan pemberitaan dari media mengenai isu

kebangkrutan yang menimpa entitas bisnis korporasi berskala besar yang ada di Amerika Serikat. Skandal yang turut melibatkan beberapa korporasi seperti WorldCom, Tyco, Toshiba Corp, Enron, Lucent, dan Xerox pada akhirnya telah mempengaruhi kualitas laba perusahaan secara negatif (Surbakti et al, 2017). Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena praktik tata kelola perusahaan juga dinilai masih belum mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan, karena masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya praktik manajemen laba dalam perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disusunlah sebuah regulasi dalam rangka penguatan penerapan mekanisme *good corporate governance* melalui Sarbaney Oxley Act pada Juli 2002.

Dalam menjalankan praktik manajemen laba, manajer cenderung untuk memilih pendekatan dalam menjalani manipulasi laba tersebut, baik dalam bentuk manajemen laba rill maupun manajemen laba akrual yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Ketika peneliti memutuskan untuk menganalisis kasus manajemen laba hanya menggunakan pendekatan akrual saja, dikhawatirkan hal tersebut dapat menghasilkan informasi yang keliru dalam pengambilan keputusan (Roychowdhury, 2006).

Meskipun telah terdapat upaya peneguhan tata kelola perusahaan yang diinisiasikan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui diberlakukannya *Sarbaney Oxley Act* (SOX), nyatanya tingkat aktivitas manajemen laba akrual telah mengalami penurunan. Sebaliknya, manajemen laba rill cenderung mengalami tren peningkatan. *Trade off* yang terjadi antara pendekatan rill dengan akrual pada manajemen laba didorong karena basis akrual lebih mudah untuk diidentifikasi karena mekanisme pengendalian internal yang semakin ketat setelah ditetapkannya SOX serta berkurangnya fleksibilitas akuntansi karena kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan di tahun-tahun sebelumnya (Zang, 2012).

Tidak hanya pada negara maju saja, kasus manajemen laba tersebut juga banyak menimpa perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada negara-negara berkembang sekalipun. Hal tersebut selaras dengan hasil publikasi *Asian Corporate Governance Association* (2014), yang menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan belum dapat dijalankan secara baik oleh negara-negara di Asia. Indonesia dilaporkan memiliki kualitas laba yang relatif rendah, dimana menduduki

peringkat ke 35 dari 48 negara yang ada di dunia. Lemahnya mekanisme tata kelola korporat tersebut telah memicu terjadinya beberapa skandal manajemen laba yang menimpa beberapa korporasi besar yang ada di Indonesia.

Seperti kasus yang menjerat emiten PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk yang lebih populer dengan nama pasar TPS Food dengan kode saham AISA. Dikutip dari salah satu situs media elektronik, perusahaan yang bergerak dalam sektor barang konsumsi ini disinyalir telah melakukan tindakan manipulasi laba berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh KAP EY Indonesia pada laporan keuangan perusahaan tahun 2017. Temuan pemeriksaan tersebut berhasil mengungkap bahwa telah terjadi *overstatement* dalam penyajian terhadap beberapa pos yang ada dalam laporan keuangan anak usaha, seperti piutang usaha sebesar Rp 4 Miliar, penjualan senilai Rp 662 Miliar, serta laba usaha sebelum beban bunga dan pajak sebesar Rp 389 Miliar (CNBC Indonesia, 2019).

Kasus manajemen laba lainnya yang cukup menyita perhatian publik adalah manipulasi laba yang melibatkan nama PT Garuda Indonesia Tbk dengan kode saham GIAA. Menurut informasi yang dikutip dari media elektronik, perusahaan penyedia jasa layanan maskapai penerbangan terbesar di Indonesia ini terbukti melakukan upaya *window dressing* yakni meninggikan laba bersih perusahaan dalam laporan keuangan dengan mengakui pendapatan dikompensasi yang belum diterima sebesar US\$ 239,94 Juta. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi kerugian yang dibukukan oleh manajemen selama tahun 2017 sebesar US\$ 216,58 Juta yang ekuivalen dengan Rp 3,09 Triliun. Dampaknya, perusahaan melaporkan capaian keuntungan pada tahun 2018 senilai US\$ 809,85 Ribu yang ekuivalen dengan Rp 11,56 Miliar (CNN Indonesia, 2019).

Praktik manipulasi laba ini ternyata juga terjadi pada salah satu badan usaha perseroan yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Skandal yang menjerat entitas ini telah berlangsung sejak tahun 2006. Perusahaan yang bergerak sebagai penyedia layanan jasa asuransi ini telah lama menyembunyikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Manajemen perusahaan terindikasi telah melaksanakan manipulasi didalam laporan keuangan perusahaan, sehingga laba yang selama ini dilaporkan pada kenyataannya hanya merupakan laba semu. Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang telah dilakukan oleh BPK RI,

diketahui bahwa dari hasil audit sementara dan perhitungan kerugian diperoleh kerugian yang harus ditanggung negara akibat skema kecurangan tersebut sebesar Rp 16,9 Triliun (Tempo, 2020)

Melalui penerbitan regulasi No. 21/POJK.04/2015 yang diusulkan Otoritas Jasa Keuangan, seluruh perusahaan diwajibkan untuk menerapkan mekanisme pengawasan dengan mengimplementasikan sistem tata kelola korporasi yang selaras menurut ketentuan yang berlaku. Pada peraturan ini, OJK telah mewajibkan seluruh emiten memiliki dewan komisaris dilengkapi dengan komite sebagai fungsi pengawasan dari dewan direksi, salah satu bagian dari komite tersebut adalah komite audit yang berhak untuk menyokong tugas fungsional komisaris saat melakukan pengawasan selama jalannya proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh dewan direksi bersama dengan manajemen.

Menurut pandangan teori keagenan, komite audit yang efektif mampu untuk meningkatkan pengawasan perusahaan dalam rangka mewujudkan perlindungan kepentingan pemegang saham dan berimplikasi pada menurunnya biaya agensi dan meningkatnya kualitas laba (Adiguzel, 2013). Melalui mekanisme pengawasan internal yang dijalankan direksi dan komite audit secara bersamaan mampu mewujudkan laba yang lebih berkualitas (Surbakti & Shaari, 2018)

Dalam rangka memperkuat fungsi daripada komite audit, maka diperlukan beberapa karakteristik pendukung yang harus melekat sebagai komplementer dari peran komite tersebut. Secara spesifik, karakteristik yang dimaksud dalam pernyataan di atas adalah ukuran, keahlian, kehadiran rapat, dan dualitas peran. Ukuran komite audit diyakini dapat mendorong terciptanya komite audit yang efektif tentunya. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan bahwa semakin besar ukuran komite audit mampu mewujudkan kontribusi yang ideal serta dapat mereduksi praktik manipulasi laba (Al-Rassas & Kamardin, 2015; Miko & Kamardin, 2015; Prastiti & Meiranto, 2013).

Faktor selanjutnya yang mendukung karakteristik komite audit adalah keahlian dari komite audit. Keahlian yang dikuasai oleh komite audit bersumber dari pengalaman maupun keilmuan yang didapatkan baik di bidang akuntansi, keuangan, maupun bisnis akan mendukung pemahaman terhadap siklus operasi

normal bisnis dan menganalisis penyajian laporan keuangan sehingga dapat mereduksi pandangan oportunistik manajer dalam mengadakan aktivitas manajemen laba (Suprianto et.al, 2017). Keahlian tersebut akan sangat mendukung personil dari komite audit dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya pelaporan keuangan dalam sebuah korporasi. Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan secara empiris bahwa komite audit merupakan pihak independen yang mempunyai keahlian pada ranah akuntansi maupun finansial berasosiasi negatif dan signifikan terhadap aktivitas manipulasi laba di sebuah perusahaan (Al-Rassas & Kamardin, 2015; Miko & Kamardin, 2015; Prastiti & Meiranto, 2013; Setiawan et.al, 2020).

Fungsi audit internal menjadi salah satu unit yang tidak terpisahkan pada implementasi mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Internal audit memegang peran sebagai pelengkap dalam *internal governance framework* yang dikembangkan dalam sebuah entitas bisnis. *Good corporate governance* menuntut peranan aktif auditor internal dalam melaksanakan fungsi pengendalian internal dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 88/PMK.06/2015 pada Pasal 4, hadirnya fungsi audit internal dan eksternal dalam sebuah perusahaan mampu mewujudkan terciptanya *corporate governance* yang baik. Auditor internal mampu melakukan analisis yang kredibel dalam rangka mendeteksi pelaksanaan manajemen laba (Prawit et.al, 2009).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berusaha menemukan hubungan empiris antara fungsi internal audit dengan aktivitas manajemen laba. Beberapa penelitian menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa fungsi internal audit memiliki pengaruh yang bersifat signifikan dan negatif terhadap manajemen laba, yang berimplikasi bahwa eksistensi fungsi audit internal mampu menurunkan praktik manajemen laba yang terjadi dalam sebuah perusahaan (Alzoubi, 2019; Anzelya & Kurniawati, 2020). Hasil yang serupa juga didapatkan dalam penelitian Ghaleb et.al, (2020) dimana fungsi audit internal mampu memberikan pengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba rill. Sehubungan dengan teori yang ada dimana fungsi audit internal dapat memperbaiki lingkungan pengendalian dan berimplikasi pada meningkatnya kualitas laporan keuangan perusahaan. Akan

tetapi, terdapat beberapa penelitian yang menjustifikasi bahwa tidak terdapat signifikansi antara fungsi audit internal dengan kualitas informasi laporan keuangan yang diproyeksikan melalui pengukuran *earnings management* (Al-Thuneibat et.al, 2016; Al-Shetwi et.al, 2011). Faktor eksternal yang mempengaruhi temuan ini adalah aturan regulasi hukum yang belum memadai sehingga dimanfaatkan oleh manajer melakukan aksinya. Hasil yang bersifat inkonsisten tersebut memerlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah fungsi audit internal dapat menekan praktik manajemen laba rill.

Terdapat beberapa faktor kinerja keuangan selain pembahasan diatas yang mempengaruhi praktik manajemen laba secara dominan yakni terdiri atas profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas merupakan kapabilitas entitas bisnis untuk memperoleh laba melalui kegiatan operasional selama satu periode waktu tertentu dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki sebagai sumber pendanaannya (Kusuma et al.,2019). *Leverage* umumnya menjadi bagian dari instrumen finansial yang mengukur bagaimana sebuah entitas bisnis menggunakan alternatif sumber pendanaan baik yang berasal dari utang pada kreditur dan ekuitas yang dimiliki (Gitman & Zutter, 2015). Sedangkan, ukuran perusahaan merefleksikan besar maupun kecilnya sebuah entitas serta dapat diproksikan melalui beberapa indikator, seperti kapitalisasi pasar maupun total aset yang dimiliki oleh entitas bisnis (Agustia & Suryani, 2018).

Penelitian saat ini dilakukan untuk menemukan bukti yang empiris dalam hubungan antara karakteristik komite audit yang diukur berdasarkan empat aspek yaitu aspek ukuran komite audit, keahlian komite audit, kehadiran rapat komite audit, dan dualitas peran komite audit serta fungsi audit internal yang diproksikan melalui ukuran audit internal, keahlian audit internal, dan sertifikasi audit internal terhadap manajemen laba rill dengan menggunakan dasar pengukuran Cohen et.al (2008) yang merupakan improvisasi dari model penelitian milik Roychowdhury (2006). Terdapat penambahan fungsi audit internal sebagai variabel bebas dalam penelitian ini merupakan sebuah kebaruan dalam penelitian ini. Hal ini menjadi sebuah perbedaan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang hanya menganalisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba saja. Melalui penelitian ini, peneliti ingin menguak lebih dalam apakah perusahaan

dengan fungsi audit internal yang baik sebagai mekanisme tata kelola korporasi yang baik dapat dibuktikan secara teoritis maupun empiris mampu mereduksi dan menekan terjadinya manajemen laba rill dalam sebuah perusahaan serta dapat menjadi salah satu instrumen investasi jangka panjang dalam memperkuat pengawasan perusahaan terhadap indikasi perilaku manajemen laba.

Riset ini dilakukan dengan merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Surbakti dan Samosir (2019) dimana dengan menambahkan beberapa kebaruan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut ini: (1) menambahkan variabel independen sebagai saran atas penelitian sebelumnya yakni fungsi audit internal sebagai mekanisme *good corporate governance*, (2) menggunakan pengukuran manajemen laba yang dilakukan oleh Cohen et al.(2008) dengan menambahkan proksi pengukuran tambahan atas model yang dikembangkan oleh Roychowdhury (2006) dan (3) menambahkan dua proksi baru dalam pengukuran karakteristik komite audit, yaitu dualitas peran komite audit dan kehadiran rapat komite audit dalam model penelitian yang diusulkan oleh peneliti.

Penyusunan atas penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi, yakni masih relatif sedikit penelitian yang membahas topik sejenis tentang karakteristik komite audit terhadap manipulasi laba melalui pendekatan rill di Indonesia terlebih lagi dengan memasukkan fungsi audit internal sebagai tambahan variabel independen yang selaras dengan mekanisme *corporate governance*. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti menjadi termotivasi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai keterkaitan antara karakter komite audit, fungsi audit internal, dan manajemen laba rill dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Fungsi Audit Internal terhadap Praktik Manajemen Laba Rill.”**

## **I.2. Perumusan Masalah**

Selaras dengan penjelasan mengenai fenomena dan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba rill?
- b. Apakah keahlian komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba rill?
- c. Apakah dualitas peran komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba rill?
- d. Apakah kehadiran rapat komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba rill?
- e. Apakah ukuran audit internal berpengaruh terhadap praktik manajemen laba rill?
- f. Apakah keahlian audit internal berpengaruh terhadap praktik manajemen laba rill?
- g. Apakah sertifikasi audit internal berpengaruh terhadap praktik manajemen laba rill?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris mengenai beberapa hal berikut ini

- a. Pengaruh ukuran komite audit terhadap praktik manajemen laba rill.
- b. Pengaruh keahlian komite audit terhadap praktik manajemen laba rill.
- c. Pengaruh dualitas peran komite audit terhadap praktik manajemen laba rill.
- d. Pengaruh kehadiran rapat komite audit terhadap praktik manajemen laba rill.
- e. Pengaruh ukuran audit internal terhadap praktik manajemen laba rill.
- f. Pengaruh keahlian audit internal terhadap praktik manajemen laba rill.
- g. Pengaruh sertifikasi audit internal terhadap praktik manajemen laba rill.

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan beberapa fenomena dan masalah sebagai latar belakang, maka terdapat beberapa signifikansi atau manfaat yang dapat dirasakan dari pelaksanaan penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pengembangan teori dan keilmuan yang berhubungan dengan pengaruh fungsi audit internal dan karakteristik komite audit terhadap praktik aktivitas manajemen laba rill di Indonesia.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat dan dampak yang positif dan dapat dirasakan implikasinya oleh beberapa pihak yang berkepentingan yakni sebagai berikut:

###### **1. Bagi Investor**

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini dapat berimplikasi menjadi sarana yang mampu memfasilitasi calon investor potensial dalam menentukan perusahaan manakah yang akan diinvestasikan melalui bagaimana kualitas laba dalam laporan keuangan yang disajikan.

###### **2. Bagi Kreditur**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar justifikasi pihak kreditur dalam menentukan pandangan atas perusahaan, melalui penilaian kualitas manajemen perusahaan yang nantinya akan diberikan pinjaman

###### **3. Bagi Pemerintah**

Bukti empiris dalam penelitian diharapkan dapat memberikan dukungan informasi sebagai dasar kajian kepada pemerintah mengenai dampak dari hadirnya fungsi audit internal serta dibentuknya karakteristik komite audit terhadap aktivitas manajemen laba rill dalam perusahaan yang terdaftar pada BEI.